

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam perwujudan *good governance* telah dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang ada beberapa tahapan yaitu:

1. Menyiapkan Rencana Strategis
2. Menyiapkan Rencana Kinerja Tahunan
3. Menyiapkan Penetapan Kinerja (PK)
4. Menyiapkan Pengukuran Pencapaian Kinerja
5. Melakukan Evaluasi Kinerja
6. Melakukan Analisis Akuntabilitas Kinerja
7. Menyajikan Akuntabilitas Keuangan

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran terkait dengan Proses Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang yaitu:

1. Dalam rangka menerapkan prinsip Good Governance, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, masih sangat diperlukan komitmen bersama dari seluruh stakeholders, khususnya konsistensi dalam pelaksanaan perencanaan sebagaimana telah direncanakan dan disusun serta dituangkan dalam dokumen perencanaan, sehingga capaian kinerja kegiatan dapat diukur keberhasilannya.
2. Melakukan efisiensi dengan anggaran dan target untuk mencapai kinerja yang baik.
3. Hendaknya merevisi ulang laporan yang telah dibuat agar tidak terjadinya kerancuan bagi pengguna laporan dan sesuai dengan standarisasi penyusunan LKj IP.

